



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN  
Jl. Hayam Wuruk No.7 Jakarta 10120  
Telp (021) 3851970 (*Hunting*), Faksimili (021) 3502045  
E-mail : banten@bpkp.go.id

---

### RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022

Dalam memastikan terwujudnya target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah menyusun rencana aksi kinerja sebagai salah satu sarana pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi.

Rencana Aksi Kinerja akan dipedomani oleh seluruh pegawai sebagai:

- 1) Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pegawai;
- 2) Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan mitra kerja;
- 3) Sarana untuk monitoring, evaluasi; dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja.

Rencana aksi telah memperhatikan pencapaian target kinerja pelaksanaan beberapa kegiatan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan risiko dari setiap kegiatan utama sehingga diharapkan tidak mengganggu pencapaian target kinerja masing-masing yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Jakarta, 10 Maret 2022 5  
Kepala Perwakilan,

R. Bimo Gunung Abdulkadir  
NIP 19640107 198402 1 001

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022  
Perwakilan BPKP Provinsi Banten

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	Satuan	TW	TW	TW	TW
					1	2	3	4							6	7	8	9
1																		
<b>BIDANG IPP</b>																		
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (juta)	1500	0	0	0	1500	1	Pengawasan atas Bantuan Operasional sekolah	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	57,556,688.00	Mujiyanto	PKPT	1			
									2	Pengawasan Sarana Prasarana Pendidikan	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	57,556,688.00	Mujiyanto	PKPT			1	
									3	Pengawasan atas Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan pada Dinas Pendidikan A Kab/Kota/Prov A	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	57,556,688.00	Mujiyanto	PKPT		1		
									4	Pengawasan atas pengujian dan verifikasi klaim Covid-19 pada BPJS Kesehatan	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	79,360,000.00	Mujiyanto	PKPT	1	1	1	1
									5	Pengawasan atas Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun) di Provinsi Banten	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	26,037,000.00	Mujiyanto	PKPT				1
									6	Pengawasan atas Pembangunan Infrastruktur SPAM di Provinsi Banten	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	26,037,000.00	Mujiyanto	PKPT				1
									7	Pengawasan atas pembangunan infrastruktur jalan tol di Provinsi Banten	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	26,037,000.00	Mujiyanto	PKPT				1
									8	Pengawasan atas Optimalisasi Program Padat Karya Kementerian PUPR	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	26,037,000.00	Mujiyanto	PKPT			1	
									9	Pengawasan atas Pengadaan ASN Formasi Tahun 2022 Tahap SKB	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	26,037,000.00	Mujiyanto	PKPT				1
									10	Pengawasan atas Pengadaan PPPK Formasi Tahun 2022	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	26,037,000.00	Mujiyanto	PKPT				1
									11	Evaluasi pada Perguruan Tinggi	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	26,037,000.00	Mujiyanto	PKPT				1
									12	Pengawasan atas Pengadaan ASN Formasi Tahun 2022 Tahap SKD	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	26,037,000.00	Mujiyanto	PKPT			1	
									13	Pengawasan Program PEN Sektor UKM_Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM)	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	26,037,000.00	Mujiyanto	PKPT		1		1
									14	Pengawasan atas Stimulus Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Masa Pandemi COVID-19 pada Kemenparekraf/Baparekraf	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	79,360,000.00	Mujiyanto	PKPT				1
									15	Pengawasan Pemanfaatan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	26,037,000.00	Mujiyanto	PKPT	1			
									16	Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan TNI/Polri	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	39,680,000.00	Mujiyanto	PKPT	1	1		
									17	Evaluasi Kemandirian Industri Farmasi dan Almatkes	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	26,037,000.00	Mujiyanto	PKPT		1		1
									18	Pengawasan atas PBJ Penanganan Covid-19	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	79,360,000.00	Mujiyanto	PKPT	1			1
									19	Pengawasan atas Tata Kelola Data Terpadu Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	79,360,000.00	Mujiyanto	PKPT		1		
									20	Audit Kinerja Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Kementerian PUPR Tahun 2021	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	26,037,000.00	Mujiyanto	PKPT			1	

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	Satuan	TW	TW	TW	TW
					TW1	TW2	TW3	TW4							1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									21	Pengawasan atas Implementasi Reformasi Birokrasi	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	26,037,000.00	Mujiyanto	PKPT				1
									22	Pengawasan terhadap Program for Result untuk Disbursement Linked Indicators (DLI) Program Reformasi Bantuan Sosial	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	26,037,000.00	Mujiyanto	PKPT	1			
									23	Pengawasan atas Program Penanggulangan Bencana	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	26,037,000.00	Mujiyanto	PKPT				1
									24	Evaluasi pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tingkat Dinas Pendidikan Provinsi	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	26,037,000.00	Mujiyanto	PKPT				1
									24	Reformasi Sistem Kesehatan-layanan primer	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	26,037,000.00	Mujiyanto	PKPT				1
									25	Reformasi Sistem Kesehatan-layanan rujukan	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	26,037,000.00	Mujiyanto	PKPT				1
									25	Reformasi Sistem Kesehatan-kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	26,037,000.00	Mujiyanto	PKPT				1
									26	Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	79,360,000.00	Mujiyanto	PKPT		1		
									27	Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP)	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	26,037,000.00	Mujiyanto	PKPT				1
									28	Penanganan Covid-19-Vaksinasi	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	39,680,000.00	Mujiyanto	PKPT	1	1	1	1
									29	Pengawasan atas Pembangunan Infrastruktur Jaringan Irigasi di Provinsi Banten	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	26,037,000.00	Mujiyanto	PKPT				1
									30	Pengawasan atas pinjaman dan bantuan luar negeri	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	13,018,500.00	Mujiyanto	PKPT	1	1		
									31	Verifikasi Disbursement Linked Indicators	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	13,018,500.00	Mujiyanto	PKPT		1	1	1
									32	Pengawasan atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Sektor Jalan dan Jembatan	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	5,207,400.00	Mujiyanto	PKPT				1
									33	Pengawasan atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Sektor Kawasan	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	5,207,400.00	Mujiyanto	PKPT				1
									34	Pengawasan atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Sektor Bendungan dan Irigasi	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	5,207,400.00	Mujiyanto	PKPT				1
									35	Pengawasan atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Sektor Air Bersih dan Sanitasi	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	0.00	Mujiyanto	PKPT				1
									36	Pengawasan atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Program Pemerataan Ekonomi (SHAT/TORA)	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	5,207,400.00	Mujiyanto	PKPT				1
									37	Pengawasan atas Perubahan Perilaku dan Komunikasi Publik atas Penanganan Covid-19	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	79,360,000.00	Mujiyanto	PKPT	1	1		
									38	Pengawasan atas Dukungan Peralatan Produksi Perikanan	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	26,037,000.00	Mujiyanto	PKPT				1
									39	Bimtek Manajemen Risiko Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 pada KPU dan Bawaslu	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	26,037,000.00	Mujiyanto	PKPT	1			1
									40	Pengawasan Program Indonesia Pintar	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	57,556,688.00	Mujiyanto	PKPT	1	1		

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
					TW1	TW2	TW3	TW4												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
									41	Pengawasan atas Program Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan Tahun 2022 (Monitoring 1 ST dan Reviu 2 ST)	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (13)	57,556,688.00	Mujiyanto	PKPT	1	1				
<b>Bidang APD</b>																				
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (juta)	653.00				653.00	1	Pengawasan Penggunaan Dana Transfer pada Sektor Pendidikan Dasar dan Menengah	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (8)	29,440,000.00	Tri Dasa	PKPT				1		
		Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi	Rupiah (juta)	68,000.23				68,000.23	2	Evaluasi Program Pengembangan Potensi Desa	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (8)	15,687,273.00	Tri Dasa	PKPT				1		
										3	Pelaksanaan Evaluasi OPAD Pada pemda A (2 PP) dan Monitoring Pelaksanaan Evaluasi OPAD Pada pemda (1 PP)	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (8)	24,533,335.00	Tri Dasa	PKPT				1	
		Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	rupiah (juta)	152,879.00				152,978.00	4	Evaluasi atas Tata Kelola Cadangan Pangan pada Pemerintah Daerah	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (8)	15,687,273.00	Tri Dasa	PKPT					1	
										5	Pengawasan atas Program Penanganan Kesenjangan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan antara Wilayah Utara dan Selatan Provinsi Banten	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (8)	42,022,500.00	Tri Dasa	PKPT					1
										6	Pengawasan atas Program Penanganan Kesenjangan Aksesibilitas Pemerataan Pendidikan Menengah yang berkualitas di Wilayah Utara dan Selatan Provinsi Banten	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (8)	42,022,500.00	Tri Dasa	PKPT					1
										7	Audit Tujuan Tertentu PBJ Penanganan Covid-19 pada Pemda	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP	15,687,273.00	Tri Dasa	PKPT	1	1	1	1	
										8	Pelaksanaan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Daerah Pemda A	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP	24,533,333.00	Tri Dasa	PKPT	1				
										9	Reviu Tata Kelola PSN Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (8)	15,687,273.00	Tri Dasa	PKPT					1
										10	Monitoring dan Analisis atas Pemanfaatan APBD untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah (PC-PEN)	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (8)	29,440,000.00	Tri Dasa	PKPT	1	1	1	1	
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/LP/BU	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Prov	1				1	10	Monitoring dan Analisis atas Pemanfaatan APBD untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah (PC-PEN)	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (8)	29,440,000.00	Tri Dasa	PKPT						
		Jumlah Kabupaten/ Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Kab/ Kota	8				8	11	Evaluasi Implementasi Perizinan Berusaha (OSS) di Daerah	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (8)	15,687,273.00	Tri Dasa	PKPT		1				
		Jumlah Provinsi dengan MRI ≥ Level 3	Prov	1				1	12	Reviu Sisa Bos Tahun 2011 dan 2019 pada Pemerintah Daerah	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (8)	15,687,270.00	Tri Dasa	PKPT	1					
		Jumlah Kabupaten/ Kota dengan MRI ≥ Level 3	Kab/ Kota	3				3	13	Pengawasan atas Peningkatan Maturitas SPIP	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (8)	85,459,000.00	Tri Dasa	PKPT				1		
		Persentase Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Persen	100				100	14	Evaluasi atas Penyaluran BLT-DD	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (8)	15,687,273.00	Tri Dasa	PKPT			1			
										15	Evaluasi atas Tata Kelola dan Perencanaan Pembangunan Desa	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (8)	24,533,333.00	Tri Dasa	PKPT	1				
										16	Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (8)	24,533,333.00	Tri Dasa	PKPT	1	1	1	1	
										17	Pengawasan Aset strategis Pemda	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (8)	15,687,273.00	Tri Dasa	PKPT			1		
								2	Workshop / Bimbingan Teknis Keuangan dan Pembangunan Desa	Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh mitra kerja (stakeholder) (8)	170,309,000.00	Tri Dasa	PKPT	1	1	1	1			

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	Satuan	TW	TW	TW	TW
					1	2	3	4							16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	Persen	100				100	19	Evaluasi atas Implementasi Bantuan Sosial Bersumber dana APBD	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (8)	15,687,273.00	Tri Dasa	PKPT		1		
									20	Pelaksanaan Evaluasi PA PBJ Tw I, Tw II, Tw III, dan Tw IV	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (8)	24,533,333.00	Tri Dasa	PKPT	1	1	1	1
									21	Birtek Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Pada Pemda	Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh mitra kerja (stakeholder) (8)	15,687,273.00	Tri Dasa	PKPT	1			
									22	Konsultasi Implementasi SIMDA-NG (FMIS)/CACM Pemda A	Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh mitra kerja (stakeholder) (8)	15,687,273.00	Tri Dasa	PKPT				1
									23	Konsultasi Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kinerja Pada Pemda	Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh mitra kerja (stakeholder) (8)	0.00	Tri Dasa	PKPT		1		
									24	Analisis Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP	0.00	Tri Dasa	PKPT				1
		Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Desa Secara Memadai	Desa	71				71	25	Monitoring dan Evaluasi atas Akuntabilitas Tata Kelola Aset Desa	Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP (8)	24,533,333.00	Tri Dasa	PKPT	1			

**Bidang AN**

2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	2	0	0	0	2	1	Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol pada BUMN	Anggaran pengawasan belum sesuai kebutuhan (19)	11,674,000.00	Sri Gratikana	PKPT				1
									2	Pengawasan atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (BUMN/D)	Anggaran pengawasan belum sesuai kebutuhan (19)	11,674,000.00	Sri Gratikana	PKPT				1
									3	Pengawasan atas Tatakelola PSN Jalan Tol pada BUMN	Anggaran pengawasan belum sesuai kebutuhan (19)	11,674,000.00	Sri Gratikana	PKPT				1
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	6	0	0	0	6	4	Pengawasan terhadap kualitas tata kelola, manajemen risiko dan satuan pengawasan intern BU Jasa Air	Anggaran pengawasan belum sesuai kebutuhan (19)	7,786,667.00	Sri Gratikana	PKPT		1		
									5	Pengawasan Kualitas Tata Kelola (GRC) dan kinerja keuangan, operasional BPD	Anggaran pengawasan belum sesuai kebutuhan (19)	7,786,667.00	Sri Gratikana	PKPT		1		
									6	Peningkatan Kualitas Tata Kelola BUMD	Anggaran pengawasan belum sesuai kebutuhan (19)	11,674,000.00	Sri Gratikana	PKPT				1
									7	Pengawasan atas aspek GRC pada aksi korporasi di lingkungan BUMD	Anggaran pengawasan belum sesuai kebutuhan (19)	58,370,000.00	Sri Gratikana	PKPT				1
									8	Reviu Tata Kelola SPAM pada BU Jasa Air	Anggaran pengawasan belum sesuai kebutuhan (19)	11,674,000.00	Sri Gratikana	PKPT				1
		Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1	0	0	0	1	9	Pengawasan terhadap Tata Kelola BLU Pendidikan dan BLUD Kesehatan	Anggaran pengawasan belum sesuai kebutuhan (19)	15,573,333.00	Sri Gratikana	PKPT		1		

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	Satuan	TW	TW	TW	TW	
					1	2	3	4							16	17	18	19	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1		Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	26	0	0	0	26	10	Pengawasan Peran BUM Desa terhadap Program Pengembangan Potensi Desa dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan BUM Desa	Risiko fasilitator kurang mampu/kompeten dalam melakukan asistensi, workshop dan sosialisasi (14)	11,674,000.00	Sri Gratikana	PKPT				1	
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/LP/BU	Jumlah BUMN dengan MRI ≥ Level 3	BUMN	1	0	0	0	1	11	Pengawasan atas Akuntabilitas BUMN	Respon terhadap permintaan layanan belum memenuhi kebutuhan pengguna (8)	15,573,333.00	Sri Gratikana	PKPT				1	
									12	Pengawasan atas Fasilitas Kredit Pemerintah untuk UMK (KUR dan Subsidi Bunga/Subsidi Margin baik reguler maupun tambahan)	Respon terhadap permintaan layanan belum memenuhi kebutuhan pengguna (8)	11,674,000.00	Sri Gratikana	PKPT		1		1	
									13	Pengawasan Fasilitas Kredit Pemerintah untuk UMK (Non KUR dan subsidi bunga/subsidi margin)	Respon terhadap permintaan layanan belum memenuhi kebutuhan pengguna (8)	11,674,000.00	Sri Gratikana	PKPT		1		1	
									14	Pengawasan atas tata kelola subsidi pupuk	Respon terhadap permintaan layanan belum memenuhi kebutuhan pengguna (8)	11,674,000.00	Sri Gratikana	PKPT			1		1
									15	Pengawasan atas pengajuan dan verifikasi klaim Covid-19 pada BPJS Kesehatan	Respon terhadap permintaan layanan belum memenuhi kebutuhan pengguna (8)	11,674,000.00	Sri Gratikana	PKPT	1	1	1	1	
		Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3	BLUD	4	0	0	0	4	16	Kualitas Pengendalian Intern pada BUMD, BLU dan BLUD	Respon terhadap permintaan layanan belum memenuhi kebutuhan pengguna (8)	58,370,000.00	Sri Gratikana	PKPT				1	
<b>Bidang Investigasi</b>											30,335,000.00	Theresia Ratna	PKPT					1	
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	1,500					1,500.00	1	Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah		30,335,000.00	Theresia Ratna	PKPT			1	
		Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	99,430					99,430.00	2	Respon Kecurangan			Theresia Ratna Astutiningsih	PKPT			1	
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan	Persen	85					85	3	Pengawasan atas Hambatan Kelancaran Pembangunan	Tidak terjadi kesepakatan antara pihak-pihak yang dimediasi dalam menyikapi permasalahan yang ada (14)	30,335,000.00	Theresia Ratna Astutiningsih	PKPT			1	
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase Hasil Pengawasan Represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	100					100	4	Deteksi Kecurangan		30,335,000.00	Theresia Ratna Astutiningsih	PKPT	1		1	
		Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	80					80	5	Pencegahan Kecurangan	Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh mitra kerja (stakeholder) (14)	124,851,000.00	Theresia Ratna Astutiningsih	PKPT	1	1	1	1
		Jumlah Pemda menindaklanjuti Area of Improvement dari Hasil Pengukuran EPK	Pemda	1					1	6	-			Theresia Ratna Astutiningsih	PKPT				
<b>Bidang P3A</b>											0.00	Suryadi	PKPT					1	
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/LP/BU	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Prov	1					1	1	-		86,280,000.00	Suryadi	PKPT			1	
		Jumlah APIP Kabupaten/ Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Kab/ Kota	8					8	2	Pengawasan atas Peningkatan Kapabilitas APIP	Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh mitra kerja (stakeholder) (13)						1	

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
					TW1	TW2	TW3	TW4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									3	Bimtek Penerapan JFA pada APIP K/L/D	Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh mitra kerja (stakeholder) (13)	9,093,333.00	Suryadi	PKPT		1		
									4	Bimtek Implementasi SIBIJAK pada APIP K/L/D	Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh mitra kerja (stakeholder) (13)	9,093,333.00	Suryadi	PKPT		1		
									5	Evaluasi Penerapan JFA pada APIP K/L/D	Tim gagal memperoleh data yang dibutuhkan (14)	2,613,334.00	Suryadi	PKPT		1		
									6	Perencanaan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pengawasan (PAEP)	Anggaran pengawasan belum sesuai kebutuhan (19)	20,800,000.00	Suryadi	PKPT	1	1	1	1
<b>BAGIAN TATA USAHA</b>																		
1	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	77				77	1	Melakukan penilaian mandiri pembangunan zona integritas unit kerja	Dokumentasi Pemenuhan Zi tidak lengkap (11)	-	Richard Anthoni					
		Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	95				95	2	Melakukan pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja	Kurangnya analisis/pemahaman terhadap proses bisnis (12)	-	Richard Anthoni					
		Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	Persen	100				100	3	Melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan sesuai SAP	Pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai ketentuan (5)	-	Richard Anthoni					
		Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Nilai	80				80	4	Melakukan Rekonsiliasi Laporan BMN	Pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai ketentuan (5)	-	Richard Anthoni					
		Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	88				88	5	Melakukan Self Assesment SAKIP Unit Kerja	Kurangnya analisis/pemahaman terhadap proses bisnis (12)	-	Richard Anthoni					
		Persentase penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)	Persen	100				100	6	Melakukan Self Assesment MR Unit Kerja	Kurangnya analisis/pemahaman terhadap proses bisnis (12)	-	Richard Anthoni					
		Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)	Persen	65				65	7	Melakukan Self Assesment SPIP Unit Kerja	Kurangnya analisis/pemahaman terhadap proses bisnis (12)	-	Richard Anthoni					
		Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks Skala 100	76				76	8	Melakukan Survei Kepuasan Layanan Unit Kerja	Respon terhadap permintaan layanan belum memenuhi kebutuhan pengguna (10)	-	Richard Anthoni					

Jakarta, 10 Maret 2022  
Kepala Perwakilan

R. Bimo Gunung Abdulkadir  
NIP 19640107 198402 1 001